

SKRIPSI

**KENDALA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA
OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
DI POLRES DHARMASRAYA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ADZHANIL PRIMA SEPTY
1510112185

Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.H

Efren Nova, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

KENDALA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRES DHARMASRAYA

(Adzhanil Prima Septy, 1510112185, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019)

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba telah menjadi permasalahan yang harus diberantas secara masif di Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memusnahkan barang bukti narkoba pada tahap penyidikan. Penyidik BNN diberi wewenang untuk memusnahkan barang bukti narkoba tertera dalam Pasal 75 huruf k UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal ini dilakukan sebelumnya harus ditetapkan status terhadap barang bukti tersebut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya untuk dimusnahkan. Penelitian ini mendeskripsikan kewenangan penyidik kepolisian negara republik indonesia dalam memusnahkan barang bukti narkoba dan kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Dharmasraya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul dan dilihat secara utuh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian ini diketahui 1. Pengaturan mengenai kewenangan penyidik kepolisian negara republik indonesia untuk memusnahkan barang bukti narkoba diatur dalam Pasal 26 PP Nomor 40 Tahun 2013 dan Pasal 21 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 2. Kendala dalam memusnahkan barang bukti narkoba adalah barang bukti narkoba yang disita belum signifikan dan menurut pertimbangan Kejaksaan Negeri Dharmasraya belum layak untuk ditetapkan dimusnahkan, tidak mempertimbangkan pasal 45 ayat (1) *jo* ayat (4) KUHAP, dan Kejaksaan Negeri Dharmasraya tidak memperhatikan Surat Edaran Jaksa Agung nomor 018 tahun 2015 tentang penanganan terhadap barang bukti narkoba dan prekursor narkoba. Seharusnya kewenangan penyidik kepolisian negara republik indonesia harus diperjelas dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyidik dan Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya mempertimbangkan pasal 45 ayat (1) *jo* ayat (4) dan khusus untuk kejaksaan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 018 tahun 2015 dalam menangani barang bukti narkoba, supaya barang bukti narkoba tidak disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Pemusnahan, barang bukti, narkoba dan penyidik